

MENERAPKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI PANDEMI COVID – 19

Maria Gorethi Vivi Wulandari

STKIP Widya Yuwana Madiun

Abstrak

Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang membuat krisis di semua sektor kehidupan masyarakat saat ini, sistem politik yang baik dibutuhkan untuk mengatur dinamika kehidupan masyarakat agar kesejahteraan umum tercapai. Gotong royong sebagai semangat khas bangsa Indonesia tentunya dapat diterapkan dalam sistem politik negara kita, Indonesia. Sistem politik yang dijiwai oleh semangat gotong royong kiranya dapat menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama menanggulangi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Setidaknya ada tiga indikator yang mampu mengindikasikan bahwa semangat gotong royong telah menjiwai sistem politik kita. Ketika indikator tersebut adalah: 1) setiap warga negara tahu dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai warga negara yang baik; 2) setiap warga negara memiliki solidaritas terhadap sesamanya; 3) terciptanya pemerintahan yang sungguh memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Gotong royong, Sistem politik, Pandemi COVID-19*

Pendahuluan

“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, - semua buat semua ! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong-royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!”¹

Teks di atas adalah kutipan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan para anggota BPUPKI. Soekarno yang sebelumnya telah menyampaikan gagasannya mengenai Pancasila memerasnya ke dalam Trisila dan kemudian Ekasila. Gotong royong merupakan perasan Ekasila dari Pancasila.

¹ <https://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/26/Partai/Pidato-Bung-Karno-1-Juni> (diakses pada 15 Oktober 2020)

Gotong royong bagi Soekarno adalah semangat khas bangsa Indonesia. Di dalam gotong royong tidak ada lagi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, semuanya bersatu. Gotong royong bahu membahu dan bergandengan tangan (Dewantara A. W., Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong: Indonesia dalam Kacamata Soekarno, 2017). Gotong royong merupakan semangat untuk berjuang bersama membentuk suatu negara yang hebat. Gotong royong adalah semangat bekerja sama dan tolong-menolong untuk membentuk kesejahteraan umum (bersama).

Kiranya semangat gotong royong ini juga dapat dipakai dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang meresahkan bangsa kita. Para staf pemerintahan, petugas medis, dan seluruh masyarakat hendaknya pun memiliki semangat bergotong royong dan mengaplikasikannya dalam kehidupan bersama. Gotong royong menjadi semangat yang melandasi perjuangan bangsa ini dalam melawan COVID-19. Semangat ini dapat tumbuh jikalau seluruh masyarakat menyadari bahwa kita semua sedang mengalami situasi sulit dan dengan demikian bersedia untuk berjuang, bahu membahu mewujudkan upaya menanggulangi pandemi ini secara bersama. Menumbuhkan kesadaran dalam diri akan pentingnya bergotong royong menangani COVID-19 menjadi hal yang sangat penting dalam situasi ini.

Dengan kata lain sebenarnya semangat gotong royong ini dapat diterapkan dalam sistem politik. Sistem politik yang dilandasi dengan semangat gotong royong kiranya akan menggerakkan seluruh elemen masyarakat, pemerintahan dan sosial lainnya untuk bergerak bersama dalam mewujudkan cita-cita negara, khususnya dalam keadaan sekarang adalah menanggulangi masalah pandemi COVID – 19. Kepercayaan penulis inilah yang membuat penulis berani menguraikannya dalam karya tulis ini. Maka secara garis besar penulis ingin mencoba menguraikan bagaimana semangat gotong royong ini diterapkan dalam sistem politik Indonesia dalam usahanya menanggulangi pandemi COVID-19.

Ada tiga bagian besar yang akan diuraikan penulis. Pertama, penulis akan menguraikan mengenai makna politik. Kedua, penulis akan menguraikan bagaimana semangat gotong royong dihidupi oleh rakyat Indonesia. Ketiga, penulis akan mencoba menguraikan bagaimana sistem politik yang bersemangatkan gotong royong ini diterapkan dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19.

Apa Itu Politik?

Istilah politik muncul dari kebudayaan bangsa Yunani. Istilah politik berasal dari kata *polis* yang dapat diartikan negara kota. Ada dua tokoh yang berjasa dalam memunculkan konsep politik, yakni Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles memaknai politik sebagai

suatu konsep yang mempersoalkan perihal cara suatu pemerintahan dijalankan sehingga mewujudkan suatu kebaikan bersama bagi setiap warga negara. Tetapi tidak semua konsep di antara keduanya sama persis, ada beberapa perbedaan dalam konsep politik yang digagas oleh Plato dan Aristoteles.

Bagi Plato negara harus memikirkan keselamatan atau kesejahteraan yang diperintah dan bukan kesejahteraan para pemerintah. Pemerintah harus mau dan mampu untuk mengorbankan kepentingannya pribadi demi kepentingan bersama (Hadiwijono, 1980, hal. 43). Plato menegaskan negara harus mengusahakan agar rakyat hidup dengan bahagia dan sejahtera.

Selanjutnya Plato mengatakan bahwa suatu negara yang ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang atau para filsuf. Alasannya, ketika suatu negara dipimpin oleh para filsuf maka rakyat akan dituntun kepada kebijaksanaan dan kebaikan (Hakim, 2010, hal. 62). Kebijaksanaan itu hanya dapat dicapai ketika manusia mampu untuk mengekang nafsunya, mengembangkan keberanian dan akhirnya menggunakan akalnyanya sehingga akal itu menuntunnya kepada kebijaksanaan. Inilah alasan Plato mengemukakan gagasan mengapa suatu negara harus dipimpin oleh para filsuf. Para filsuf mengatur negara, menuntun masyarakat dengan akal sehingga mencapai suatu kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang diraih dalam suatu pemerintahan akan menciptakan kebahagiaan bagi seluruh warga negara.

Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk politik (*zoon politikon*) yang hidup di tengah negara kota (*polis*). Politik bagi Aristoteles merupakan suatu persatuan warga negara yang berfungsi untuk membicarakan dan menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan bersama bagi seluruh masyarakat. Seperti Plato, Aristoteles juga menekankan bahwa pemerintah harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Menurut Aristoteles semua yang menyangkut kebaikan bersama (*bonum commune*) lebih luhur nilai moralnya daripada segala sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadi (Surbakti, 1992, hal. 2).

Manusia sebagai makhluk politik secara otomatis membentuk sebuah masyarakat. Di dalam masyarakat inilah setiap orang menunjukkan dirinya secara nyata atau mengaktualisasikan dirinya. Manusia memperoleh keberadaan dan penyempurnaan dirinya di tengah masyarakat (Hadiwijono, 1980, hal. 53). Saat manusia berelasi dengan manusia lain, di saat itulah ia menemukan keberadaan dirinya sebagai makhluk politik. Oleh karena adanya relasi antar manusia, maka dibutuhkan negara untuk menjamin kesejahteraan bersama. Negara memungkinkan setiap manusia dapat memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan diri

dan mendapatkan pengakuan dengan baik. Singkatnya, negara berfungsi untuk memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh kehidupan yang baik.

Dari dua konsep politik yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles terlihat bahwa pada zaman Yunani kuno politik dipahami sebagai suatu cara menemukan dan menerapkan suatu sistem pemerintahan agar kebaikan bersama (*kesejahteraan umum/bonum commune*) tercapai. Konsep politik Yunani kuno menekankan pada “apa yang seharusnya” dan “dengan cara apa” kebaikan bersama seluruh warga negara dapat dicapai. Berpolitik membicarakan dan merumuskan tujuan bersama yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan setelah itu ikut serta dalam mewujudkan tujuan bersama itu (Surbakti, 1992, hal. 3).

Politik sejatinya tidak pernah lepas dari yang namanya *bonum commune*, atau kebaikan bersama. *Bonum commune* adalah istilah bahasa latin yang digunakan untuk menggambarkan kebaikan bersama. Terdiri dari dua kata, yakni *bonum* yang artinya baik dan *commune* yang artinya bersama, maka *bonum commune* dapat dimaknai sebagai kebaikan yang ditujukan bagi keseluruhan anggota komunitas (Untara & Hendrawan, 2017, hal. 8). *Bonum commune* merupakan dasar dari sebuah pemerintahan. Setiap pemerintahan berusaha untuk mewujudkan suatu kebaikan bersama. Setiap pemerintahan dalam suatu negara senantiasa memfokuskan diri untuk menciptakan dan mengusahakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Maka dalam usaha untuk menciptakan *bonum commune*, setiap warga negara harus mengambil peran, sesuai dengan fungsinya masing-masing, untuk mengusahakan terciptanya kebaikan bersama itu. Setiap warga negara harus sadar bahwa dirinya memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan kebaikan bersama. Setiap warga negara harus bersedia saling melayani sesamanya di dalam negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *bonum commune* dalam konteks politik sebenarnya berkaitan dengan kesadaran manusia sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang saling membutuhkan dan oleh karenanya berupaya mengusahakan keadaan masyarakat yang baik (Untara & Hendrawan, 2017, hal. 24).

Jika *bonum commune* dalam hal ini dimaknai sebagai sebuah kesadaran manusia untuk menciptakan suatu kebaikan bersama, maka politik senantiasa berkaitan dengan *bonum commune*. Oleh karenanya konsep politik mengandaikan bahwa kekuasaan, sistem, perundang-undangan, dan fungsi pemerintahan semuanya terarah pada terciptanya kebaikan bersama atau kesejahteraan umum masyarakat. Politik tidak hanya berhenti pada pencarian mengenai yang baik tetapi soal bagaimana menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk terciptanya masyarakat yang lebih baik. Semua masyarakat berupaya untuk mengaktualisasikan dirinya untuk menciptakan kebaikan bersama. Dengan demikian politik senantiasa dimaknai sebagai

suatu sistem atau tatanan hidup bersama untuk mencapai *bonum commune* (kebaikan bersama) (Dewantara, Diskursus Filsafat Pacasila, 2017, hal. 23).

Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Istilah gotong royong berasal dari kata, *gotong* dan *royong*. Kedua kata ini berasal dari bahasa Jawa. *Gotong* berarti mengangkat, dan *royong* berarti bersama-sama. Gotong royong dalam masyarakat berarti bekerja secara bersama-sama.

Sebenarnya istilah ini muncul untuk menggambarkan suatu sistem kerja sama, tolong-menolong, serta bahu membahu di antara masyarakat desa dalam bercocok tanam, membuat rumah atau perbaikan rumah, penyelenggaraan pesta, aksi sosial penanganan musibah atau bencana, pengerahan tenaga tanpa bayar (suka rela) untuk pembuatan atau perbaikan fasilitas umum (Endro, 2016, hal. 91).

Budaya gotong royong ini terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, budaya gotong royong ini dapat diidentikan dengan rasa kekeluargaan dan solidaritas antarmasyarakat di Indonesia. Biasanya masyarakat pedesaan yang memegang erat budaya gotong royong beranggapan bahwa sebagai makhluk hidup mereka harus saling tolong menolong. Bahkan dalam masyarakat pedesaan gotong royong menjadi suatu keharusan dan merupakan ukuran nilai kesopanan. Tidak sopan bagi masyarakat pedesaan jika seseorang menolak permintaan tetangganya yang memohon pertolongan. Dalam budaya masyarakat pedesaan seseorang diwajibkan sebisa mungkin untuk menyanggupi apa yang menjadi permintaan dari tetangga atau orang lain yang meminta pertolongan. Endro (2016, hal. 92) menggambarkan keharusan ini dengan sangat jelas:

“Keharusan untuk menyanggupi didasarkan pada anggapan bahwa di kemudian hari ketika dia memerlukan pertolongan yang sama untuk lahan miliknya, tetangga tersebut harus menyanggupi juga. Jika dia lalai dari kesanggupannya, maka riwayatnya akan tercatat dalam ingatan tetangga-tetangganya sehingga dia tidak akan mendapatkan pertolongan saat membutuhkan. Kelalaiannya akan berakibat sangsi sosial berupa pengucilan dari pergaulan antar warga dan sangsi ekonomi berupa kesulitan untuk memperoleh penghasilan dan sarana hidup yang bisa dimilikinya di lingkungan tersebut”.

Nilai gotong royong mewarnai seluruh dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Soekarno, presiden pertama Indonesia, merupakan tokoh penting yang mengusahakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno sendiri menggagas suatu konsep negara ideal bagi rakyat Indonesia, yakni negara gotong royong. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno

mengatakan bahwa gotong royong merupakan perasaan dari Pancasila dan merupakan konsep negara bangsa Indonesia. Berikut kutipan pidato Soekarno:

“Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, - semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong-royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong "Gotong Royong" adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu *karyo*, satu *gawe*. Marilah kita menyelesaikan *karyo*, *gawe*, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntulbaris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong”.²

Bagi Soekarno, gotong royong adalah semangat khas dan asli dari bangsa Indonesia. Dalam semangat dan budaya gotong royong tidak ada lagi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, semuanya bersatu. Gotong royong berarti bahu membahu dan bergandengan tangan (Dewantara A. W., Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong: Indonesia dalam Kacamata Soekarno, 2017, hal. 19). Gotong royong merupakan semangat untuk berjuang bersama-sama membentuk suatu negara yang hebat. Gotong royong adalah semangat bekerja sama dan tolong-menolong untuk membentuk kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Gotong royong menjadi dasar dan semangat hidup masyarakat Indonesia, yang menekankan sikap kerja sama untuk mewujudkan kepentingan bersama. Semangat gotong royong didasarkan pada semangat kekeluargaan dan kesadaran akan pentingnya mengutamakan kesejahteraan bersama. Maka dengan demikian semangat dan budaya gotong royong merupakan cara bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Singkatnya, gotong royong merupakan semangat dan budaya untuk mewujudkan *bonum commune* yang khas dari masyarakat Indonesia.

Menerapkan Semangat Gotong Royong dalam Sistem Politik

Gotong royong merupakan semangat yang dapat diterapkan dalam sistem politik. Oleh karenanya istilah “politik gotong royong” kiranya dapat kita pakai di sini untuk

² https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=39&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno (diakses dan diunduh pada 17 Oktober 2020)

menggambarkan penerapan semangat gotong royong dalam sistem politik kita. Sebagai konsep politik, politik gotong royong sudah selayaknya dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap adil, sikap mengutamakan kepentingan bersama, dan sikap untuk mengaktualisasikan diri serta terlibat dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam diri masyarakat kita. Politik gotong royong tidak hanya berfokus pada hasil akhir dalam suatu kerja sama, atau berfokus pada solidaritas saat bekerja. Lebih daripada itu, konsep politik gotong royong lebih menekankan perwujudan keadilan dan aktualisasi diri setiap masyarakat untuk saling bekerja sama sesuai perannya masing-masing demi mencapai kebaikan bersama. Dengan demikian, setiap warga negara wajib untuk memberikan diri, memberikan sumbangsih bagi terwujudnya suatu kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Kerja sama yang dilakukan dalam penerapan konsep politik gotong royong pun dipandang dan dimaknai sebagai suatu sikap mengembangkan diri secara penuh. Sebab pada dasarnya, sama seperti yang diungkapkan Aristoteles, manusia hanya dapat mencapai aktualisasi diri jika ia berguna, berdampak, dan berada di tengah orang lain. Setiap individu dalam politik individu diharapkan mampu bekerja sama dan mampu membantu individu lain untuk dapat berkembang pula sehingga komunitas yang ideal terbentuk. Gotong royong merupakan keseimbangan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat secara timbal balik (Dewantara A. W., 2018, hal. 33). Berkaitan dengan hal ini Endro (2016, hal. 112) menjelaskan demikian:

Sebagai anggota komunitas gotong royong, dia (individu) selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik dalam perjuangan bersama individu-individu lain untuk mewujudkan komunitas ideal, meskipun harus memberikan kesempatan kepada individu lain untuk memimpinnya atau bahkan untuk mengambil alih tindakan yang sebenarnya ingin dilakukannya sendiri, mengingat apa yang terpenting bagi dirinya adalah cara terbaik terwujudnya komunitas ideal, tercapainya tujuan bersama.

Politik gotong royong diharapkan mampu mewujudkan unsur-unsur di atas. Selanjutnya, politik gotong royong dalam hal ini merupakan suatu perwujudan nyata dari usaha masyarakat untuk mewujudkan *bonum commune* di dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia. Bila dilihat kembali ada kemiripan antara konsep negara gotong royong yang digagas oleh Soekarno dan konsep negara *bonum commune* yang digagas oleh Aristoteles. Keduanya menggagas suatu negara yang menjunjung tinggi perwujudan kepentingan bersama. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik gotong royong adalah konsep politik *bonum commune* yang ideal sekaligus kontekstual dengan keadaan masyarakat Indonesia. Gotong royong menjadi semangat, fondasi sekaligus sarana mencapai kebaikan bersama secara

nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Dewantara A. W., Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong: Indonesia dalam Kacamata Soekarno, 2017, hal. 68).

COVID-19 dan Masalahnya

Konsep politik gotong royong ini ditawarkan penulis sebagai konsep politik guna menghadapi pandemi covid-19. Namun sebelum kita membahas lebih jauh perihal hal ini, sebaiknya kita mengetahui mana saja masalah yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Setidaknya ada lima masalah atau krisis yang kita hadapi oleh karena munculnya pandemi COVID-19 dalam masyarakat kita.

a. Masalah Birokrasi Pemerintahan

Pandemi COVID-19 ini membuat krisis semua sektor kehidupan. Dalam masa krisis seperti ini sistem birokrasi yang ada tampaknya masih berbelit-belit. Aneka aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak efektif, dan malah banyak menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat. Selain itu lambannya gerak pemerintah dalam merespons masalah. Jika dilihat lebih mendalam terdapat juga ego sektoral antar kementerian/ dan lembaga pemerintahan yang memperburuk penanganan penyebaran COVID-19 ini (Amrynudin & Katharina, 2020, hal. 26).

b. Masalah Kesehatan

Presiden Jokowi mengungkapkan masih banyak ditemukan kekurangan dalam hal penanganan pandemi pada sektor kesehatan. Hal itu itu terlihat dari masih kurang maksimalnya pemenuhan kebutuhan bahan baku obat dan alat kesehatan yang mayoritasnya masih diperoleh dari negara lain alias impor.³ Selain itu juga ada masalah insentif bagi tenaga medis yang masih terkendala oleh sistem birokrasi yang berbelit.

c. Masalah Perekonomian Masyarakat

Sektor ekonomi juga menjadi sektor yang mengalami krisis besar akibat pandemi ini selain sektor kesehatan. Bisa dilihat banyak masyarakat kita kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini. Dilansir dari CNBC Indonesia, setidaknya tiga juta pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan.⁴ Belum lagi jika kita melihat

³ <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-wabah-corona-ungkap-banyak-kekurangan-di-sektor-kesehatan/5399032.html> (diakses pada 18 Oktober 2020).

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200603193109-4-162890/3-bulan-corona-3-juta-orang-kena-phk-dirumahkan> (diakses pada 18 Oktober 2020).

masyarakat miskin yang hanya bisa bekerja serabutan, dapat dipastikan mereka mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa selama masa pandemi ini. Mereka dihadapkan pada pilihan, “Keluar rumah mati karena virus corona, atau diam di rumah mati karena merana”. Artinya bahwa mereka jika bekerja di luar rumah ada kemungkinan akan terpapar virus corona dan meninggal karenanya, namun jika mereka berdiam diri di rumah mereka tidak memiliki penghasilan untuk bertahan hidup.

d. *Masalah dalam Sektor Pendidikan.*

Bisa dilihat bahwa dunia pendidikan saat ini sedang mengalami permasalahan menyangkut sistem pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang semula konvensional berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Hal ini mau tidak mau juga menimbulkan masalah, terutama bagi daerah-daerah yang kurang mendukung fasilitas pembelajaran jarak jauh.

e. *Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Mematuhi Protokol Kesehatan.*

Pemerintah telah berusaha membendung persebaran virus corona dengan menerapkan beberapa aturan misalnya dengan masyarakat diwajibkan untuk mengenakan masker saat berada di luar rumah, melakukan *physical distancing* serta menghindari kerumunan. Namun pada kenyataannya setelah pemerintah menerapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru masyarakat pun acuh tak acuh dengan protokol kesehatan yang ada.

Menerapkan Semangat Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Pertanyaan yang dapat diajukan adalah “Bagaimana menerapkan semangat gotong royong dalam sistem politik di tengah situasi pandemi seperti ini?”. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita terlebih dahulu melihat pokok permasalahan dari beberapa kasus yang telah diuraikan di atas. Pertama, yang menjadi permasalahan adalah sistem birokrasi yang berbelit. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sebagian besar dikarenakan karena sistem birokrasi yang berbelit. Para pejabat pemerintahan lebih asyik mengurus hal-hal administratif belaka, tanpa mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah lebih berorientasi pada penyelesaian kuantitas administratif daripada kualitas kehidupan. Kedua, yang menjadi permasalahan adalah rendahnya rasa solidaritas dan kesadaran masyarakat kita terhadap kehidupan sesamanya. Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi tanda bahwa satu sama lain masyarakat kita mengabaikan keselamatannya sendiri dan keselamatan orang lain di sekitarnya.

Penerapan semangat gotong royong dalam sistem politik pertama-tama harus dimulai dari menumbuhkan rasa solidaritas dan kesadaran bahwa tiap warga negara bertanggung jawab untuk menciptakan suatu kebaikan bersama. Di masa pandemi ini, kesadaran akan *bonum commune* tak lain adalah dengan mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kehidupan orang lain. Setiap warga negara saat ini memiliki tanggung jawab akan kehidupan warga negara lainnya. Dengan mematuhi protokol kesehatan, setiap warga negara telah berusaha untuk menyelamatkan kehidupan sesamanya. Inilah juga peran yang paling sederhana dan paling mungkin untuk dilakukan oleh setiap warga negara demi mewujudkan *bonum commune* di masa pandemi ini. Gotong royong dimaknai dalam hal ini dimaknai sebagai suatu sikap menghargai kehidupan sesama seperti menghargai kehidupanku pribadi.

Kedua, politik gotong royong diwujudkan dalam sikap solidaritas sebagai sesama manusia, bahu membahu menolong yang berkekurangan. Kita sebagai warga negara dengan semangat gotong royong ditantang untuk solider kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang miskin dan menderita. Tantangan ini terutama ditujukan bagi mereka yang berkelimpahan harta. Kaum kaya ditantang untuk bersikap solider kepada kaum miskin. Relakah mereka menyumbangkan sebagian hartanya untuk menghidupi saudaranya yang sedang berkekurangan? Relakan mereka mengorbankan rezekinya untuk memberikan rezeki kepada orang yang membutuhkan?

Ketiga, mewujudkan pemerintahan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah haruslah dipergunakan untuk melayani masyarakat. Dalam semangat gotong royong kiranya sistem birokrasi yang berbelit-belit sebisa mungkin disederhanakan. Pemerintah haruslah mengutamakan nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi harusnya dapat mempermudah masyarakat mendapatkan layanan untuk menunjang kehidupan mereka, bukannya mempersulit mereka untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pemerintah harusnya menjadi pelayan bagi masyarakat di situasi krisis seperti saat ini. Dalam hal ini Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina (2020, hal. 29) mengungkapkan hal yang serupa, “Diperlukan karakter *servant leadership* yang memiliki visi yang jelas, mampu mendengarkan, dan mengakomodasi suara bawahan dan rakyatnya serta mampu menggerakkan bawahannya menjadi lebih adaptif dan gesit dalam menghadapi berbagai kondisi yang tidak dapat diprediksi”.

Penutup

Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara akan berpengaruh besar terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 ini pula sistem politik juga

memerankan penting dalam pengaturan seluruh dinamika masyarakat agar: pertama, kasus pasien terjangkit pandemi COVID-19 semakin menurun; kedua, terciptanya suatu kesejahteraan bersama seluruh masyarakat.

Indonesia yang sedari awal memiliki semangat gotong royong dalam budaya masyarakatnya, kiranya sungguh dapat diterapkan dalam sistem politik yang ada. Politik gotong royong menjadi salah satu konsep politik yang memungkinkan terciptanya *bonum commune* bagi masyarakat Indonesia di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan semangat gotong royong sendiri telah mendarah daging di dalam diri masyarakat Indonesia. Konsep politik gotong royong menekankan perwujudan keadilan dan aktualisasi diri setiap masyarakat yang saling bekerja sama sesuai perannya masing-masing untuk mencapai kebaikan bersama. Dengan demikian setiap warga negara wajib untuk memberikan suatu sumbangsih bagi terwujudnya suatu kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks masa pandemi ini, politik gotong royong dapat menciptakan *bonum commune* ketika setiap warga negara tahu dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai warga negara yang baik; dan setiap warga negara memiliki solidaritas terhadap sesamanya dengan dukungan pemerintahan yang sungguh memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amrynudin, A. D., & Katharina, R. (2020). Birokrasi dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. *Info Singkat, Vol XII, No. 9*, 25-30.
- Dewantara, A. W. (2017). *Alangkah hebatnya negara gotong royong: Indonesia dalam kacamata Soekarno*. PT Kanisius.
- Dewantara, A. W. (2017). *Diskursus Filsafat Pacasila*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Dewantara, A. W. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Madiun: STKIP Widya Yuwana.
- Endro, G. (2016). Tinjauan Filosofis Praktik Gotong Royong. *RESPONS volume 21 no. 01*, 89-112.
- Hadiwijono, H. (1980). *Sari Sejarah Filsafat barat 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hakim, A. (2010). Negara dalam Perspektif Plato. *Ilmu Ushuluddin Vol. 9, No. 1*, 59-74.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Garasindo.
- Untara, S., & Hendrawan, D. (2017). *Bonum Commune dalam Filsafat Barat*. Yogyakarta: Kanisius.

Sumber Website:

https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=39&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno
(diakses dan diunduh pada 17 Oktober 2020)

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200603193109-4-162890/3-bulan-corona-3-juta-orang-kena-phk-dirumahkan> (diakses pada 18 Oktober 2020).

<https://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/26/Partai/Pidato-Bung-Karno-1-Juni>
(diakses pada 15 Oktober 2020)

<https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-wabah-corona-ungkap-banyak-kekurangan-di-sektor-kesehatan/5399032.html> (diakses pada 18 Oktober 2020).